



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LKj KECAMATAN KOTO XI TARUSAN TAHUN ANGGARAN 2025

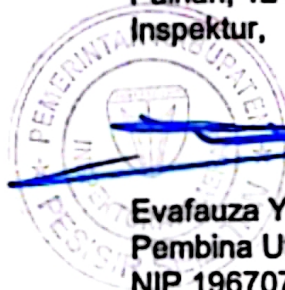
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Painan, 12 Maret 2026

Inspektur,




Evafauza Yuliasman, S.E., MSi.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19670712 199202 1 001



KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESIR SELATAN



LKJ

TAHUN 2025.

KEC. KOTO XI TARUSAN

TAHUN 2026

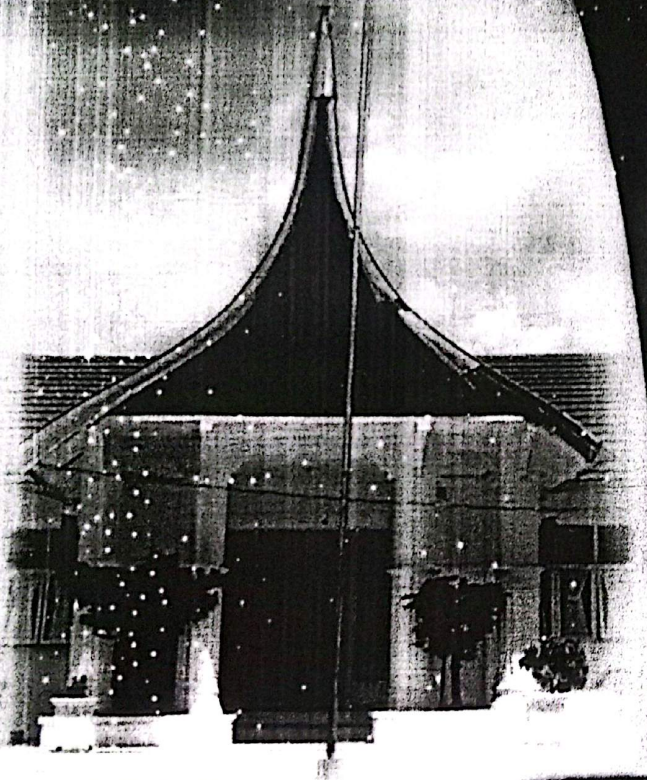


**KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

LKJ

TAHUN 2025

KEC. KOTO XI TARUSAN



23/2 2025

Zeit
Apri Juniarti

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2025 adalah laporan kinerja tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Koto XI Tarusan 2016-2021. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintahan Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2023 dengan Perjanjian Kinerja Pemerintahan Daerah Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2025 dengan 3 Sasaran Strategis dan 3 indikator kinerja utama.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, kebersihan/kegagalan Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2025, sebagai berikut :

MISI 1 : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan transparan.

Pencapaian Kinerja untuk 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (delapan) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 1 sebesar 107,67%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk sangat baik. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan Koto XI Tarusan	Skala	(A) 89,5	68,06	76,045
1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	91,50	91,00	99,45
	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	100	53,00	53
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik	%	87%	91,30	104,94
		Angka Kemiskinan Ekstrem	%	0%	0,00	0
		Prevalensi Stunting (EPPGM)	%	6,5%	10,56	162,46
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 1						70,84



Misi 2 : Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, tentram dan Dinamis

Pencapaian Kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 2 sebesar 100% Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk **Sangat Memuaskan** Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 2

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2022		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.1	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tentram dan Dinamis	1.	Persentase Konflik yang diselesaikan	%	100%	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 2							100 %



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan informasi tentang ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2025. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama tahun 2025, sebagai konsistensi kami dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi khususnya Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

Akhir Kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayat-Nya, serta kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk meningkat kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah dalam mewujudkan Visi Kabupaten Pesisir Selatan.

Tarusan, 31 Januari 2026

(Camat Koto XI Tarusan



(NURLAINI, SE. M.Si)

NIP. 19730412 200801 1 01





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
IKHTISAR EKSEKUTIF		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Maksud dan Tujuan.....	I-2
	1.3. Dasar Hukum.....	I-3
	1.4. Aspek Strategis Organisasi.....	I-3
	1.5. Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	I-6
	1.6. Gambar Umum Kecamatan Koto XI Tarusan.....	I-10
	1.7. Struktur Organisasi	I-13
	1.8. Kepegawaian	I-14
	1.9. TUgas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah	I-16
	1.10. Sistematika Penyusunan	I-27
BAB II	PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
	2.1 Rencana Strategis Kecamatan Koto XI Tarusan	II-1
	2.1.1 Visi	II-1
	2.1.2 Misi	II-1
	2.2.3 Tujuan dan Sasaran	II-2
	2.2. Perjanjian Kinerja	II-3
	2.3. Indikator Kinerja Utama.....	II-4
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
	3.1. Metodologi Penilaian Capaian Kinerja	III-1
	3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	III-2
	3.3. Capaian Kinerja Pemerintahan Kecamatan Koto XI Tarusan	III-3
	3.4. Akuntabilitas Keuangan	III-39
BAB IV	PENUTUP	IV-1
	4.1. Kesimpulan	IV-1
	4.2. Saran	IV-2



DAFTAR TABEL

Tabel	1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 1	1
Tabel	2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 2	
Tabel	1.1	Luas Kecamatan Koto XI Tarusan Menurut Nagari Tahun 2025	I-11
Tabel	1.2.	Penduduk Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2025	I-12
Tabel	1.5.	Jumlah Pegawai di Lingkup Kantor Camat Koto XI Tarusan Berdasarkan Golongan	I-14
Tabel	1.5.1	Jumlah Pegawai diLingkungan Kantor Camat Koto XI Tarusan Berdasarkan Pendidikan	I-15
Tabel	2.1.	Misi, Tujuan dan Sasaran	II-2
Tabel	2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	II-3
Tabel	2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Koto XI Tarusan	II-4
Tabel	3.1.	Kategori penilaian keberhasilan/kegagalan	III-2
Tabel	3.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Pemerintahan Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2025	III-2
Tabel	3.3.1	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Nilai AKIP Tahun 2025	III-3
Tabel	3.3.2	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Tahun Sebelumnya	III-4
Tabel	3.3.3	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026	III-5
Tabel	3.3.4	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya	III-5
Tabel	3.3.5	Rincian laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 dan 2023	III-6
Tabel	3.3.6	Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Nilai AKIP	III-9
Tabel	3.3.7	Detail Nilai SKM	III-11
Tabel	3.3.8	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025	III-12
Tabel	3.3.8.1	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya	III-13
Tabel	3.3.9	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026	III-13
Tabel	3.3.10	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya	III-14
Tabel	3.3.11	Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat	III-16
Tabel	3.3.12	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2025	III-18
Tabel	3.3.13	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	III-19
Tabel	3.3.14	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kematangan Inovasi Kecamatan Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026	III-20



Tabel	3.3.15	Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2025	III-23
Tabel	3.3.16	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Tahun 2025	III-24
Tabel	3.3.17	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026	III-25
Tabel	3.3.18	Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Pada Tahun 2025	III-27
Tabel	3.3.19	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Angka Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025	III-28
Tabel	3.3.20	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Angka Kemiskinan Ekstrem Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026	III-29
Tabel	3.3.21	Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Angka Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025	III-31
Tabel	3.3.22	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Prevalensi Stunting (EPPGM) Tahun 2025	III-32
Tabel	3.3.23	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Prevalensi Stunting (EPPGM) Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026	III-33
Tabel	3.3.24	Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Prevalensi Stunting (EPPGM) Tahun 2025	III-34
Tabel	3.3.25	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Konflik yang diselesaikan Tahun 2025	III-35
Tabel	3.3.26	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Konflik yang diselesaikan Tahun 2025 Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026	III-36
Tabel	3.3.27	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Konflik yang diselesaikan Tahun 2025 Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya	III-37
Tabel	3.3.28	Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Persentase Konflik yang diselesaikan Tahun 2025	III-38
Tabel	3.4	Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	III-40





DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Nagari Se-Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2025	I-12
Gambar	1.2	Struktur Organisasi Perangkat Daerah kecamatan Koto XI Tarusan	I-13
Gambar	3.1	Grafik Nilai SKM Per Unsur	III-12



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, maka setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya harus transparan dan akuntabel termasuk dalam pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan tersebut dirangkum dan dijabarkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja pemerintahan.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat nagari meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Sesuai dengan Azas akuntabilitas maka setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Pemerintahan harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Sehubungan dengan hal tersebut Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat daerah (OPD) Tahun 2025. Penyusunan LKj Kantor Camat Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan tahun 2025 adalah bentuk pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan kepada masyarakat dan stekholder atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diamanatkan kepada Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berisikan informasi terkait dengan keberhasilan, kegagalan hambatan dan solusi yang dilakukukan dalam pencapaian target kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang, baik penyempurnaan penetapan sasaran dan target kinerja, maupun penyempurnaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kebijakan yang diperlukan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan tahun 2025 mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadi LKJIP 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2025
2. Aspek Manajemen kinerja : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJIP 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang.



1.3. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan tahun 2025 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021-2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Pada dasarnya Laporan Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kecamatan Koto Xi tarusan Tahun 2025. Capaian Kinerja (Performance Results) tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kerja (Performance Plan) Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.



Adapun sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Koto XI Tarusan tahun 2021-2026 antara lain :

1. Terwujudnya pemerintah yang Akuntabel dan berkinerja, dengan indicator sasaran sebagai berikut :
 - Nilai AKIP Kecamatan Koto XI Tarusan
2. Meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan public, dengan indicator sasaran sebagai berikut
 - Indek Kepuasan Masyarakat
 - Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan
 - Persentase Pemerintah nagari Yang memiliki Administrasidan Kinerja Baik
 - Angka Kemiskinan Ekstrim
 - Prevalensi Stunting (EPPGM)
3. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, dengan indicator sasaran sebagai berikut
 - Persentase Konflik yang Diselesaikan

Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategis. Strategis yang berisikan langkah-langkah program-program indicator untuk mewujudkan visi dn misi. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut Kecamatan Koto XI Tarusan menetapkan strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah kecamatan,
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan,
3. Meningkatkan efektifitas SOP dan pengawasan pelayanan,
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur kecamatan Koto XI Tarusan,
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.



Strategi yang ditetapkan sebagaimana tersebut diatas mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

- a. Mendorong peningkatan sumber daya aparatur dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tupoksi aparatur
- b. Pengadaan sarana prasarana pelayanan dan pelaksanaan SOP
- c. Membentuk tim pengawasan dan pembinaan aparatur dan penyelenggaraan pemerintah
- d. Membentuk tim pembinaan dan penyelenggara Musrenbang.

2. Eksternal

- a. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur.
- b. Mengajukan anggaran pengadaan sarana prasarana dan mensosialisasikan SOP.
- c. Melakukan koordinasi dengan RKPD terkait dalam pengawasan/pembinaan aparatur dan penyelenggaraan pemerintah.
- d. Melakukan koordinasi dengan RKPD terkait dalam penyelenggaraan musrenbang.



1.5 Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/Strategis, Weakness, Opportunity and threat). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (straight)

1. Telah ditetapkan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2017 tentang Pembentukan dan SUsunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor tahun tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Keputusan ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kantor Camat Koto XI Tarusan.
2. Aparat Kecamatan Koto XI Tarsuan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.
3. Pola kerja di kantor Kecamatan Koto XI Tarusan yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif.
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di kecamatan.



b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis.
2. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator computer uang berhubungan dengan pelayanan terpadu
3. Dalam pelaksanaanya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar instansi dalam urusan perencanaan.
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
6. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/upt/uptd yang diharapkan dapat memperlanca dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis lingkungan Eksternal**a. Faktor Peluang (Opportunity)**

1. System dan birokrasi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah tertata dengan baik.
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegrasi sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di kantor Kecamatan Koto XI Tarusan.
3. Hubungan yang harmonis dengan instansilain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)



4. Ditetapkan Peraturan daerah Kabupaten pesisir Selatan nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2030. Perda ini merupakan pedoman bagi pembangunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

b. Faktor Ancaman/Tantangan (Threath)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, social ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kantor Kecamatan Koto XI Tarsusan.

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain:

1. Sarana danprasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kualitas.
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan.
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun diklat penjenjangan structural sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



5. Mengendorkan semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil musrenbang desa dan mursenbangkecamatan.
6. Lemahnya komitmen multi pihak dan kepastian kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting).
7. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya.
8. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
9. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software maupun brainware.
10. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas social yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.



1.6 Gambaran Umum Kecamatan Koto XI Tarusan

A. Kondisi Geografis Daerah

1. Posisi

Kecamatan Koto XI Tarusan merupakan satu dari 15 (lima belas) Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang berada paling utara dan berbatas langsung dengan Kota Padang dan menjadi pintu gerbang untuk masuk ke Kabupaten Pesisir Selatan. Secara geografis terletak pada 100°19,00'-100°34,70' BT dan 0°59,00'-1°17,30'LS dengan luas wilayah tercatat 425,63 km² atau 7,4% dari luas Kabupaten Pesisir Selatan.

Topografi Kecamatan Koto XI Tarusan adalah berupa daratan dan berbukit-bukit, berada di belehan pegunungan Bukit Barisan dan sebagian wilayah merupakan kawasan hutan. Luas kawasan hutan di Kecamatan Koto XI Tarusan mencapai 70,8% dari luas wilayah. Lahan untuk areal budidaya pertanian tercatat sekitar 26,9%, sementara lahan untuk perumahan dan pemukiman hanya tercatat 1.18%,. Sisanya yaitu sebesar 0.94% merupakan semak belukar, ilalang, rawa dan sebagainya. Di bagian barat Kecamatan Koto XI Tarusan membentang wilayah perairan laut dengan gugusan pulau-pulau kecil.

Kecamatan Koto XI Tarusan yang bertopografi daratan dan berbukit-bukit tersebut adalah sebagai perpanjangan dari bukit Barisan, dengan tinggi 2 s/d 25 M dpl. Ibukota kecamatan berjarak 19 km dari ibu kota Kabupaten dan 56 km dari ibu kota Provinsi. Curah hujan rata-rata 242 mm dan jumlah hari hujan 10,75 hari perbulan.

Adapun wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan

- Sebelah uatar berbatas dengan Kota Padang
- Sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Bayang
- Sebelah timur berbatas dengan Kabupaten Solok, dan
- Sebelah barat berbatas dengan Samudra Indonesa dan Kab. Kep. Mentawai.



2. Wilayah Administrasi

Pada tahun 2025, bentuk wilayah administratif Kecamatan Koto XI Tarusan terdiri dari 23 Nagari dan 51 Kampung. Secara rinci jumlah nagari dan kampung per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

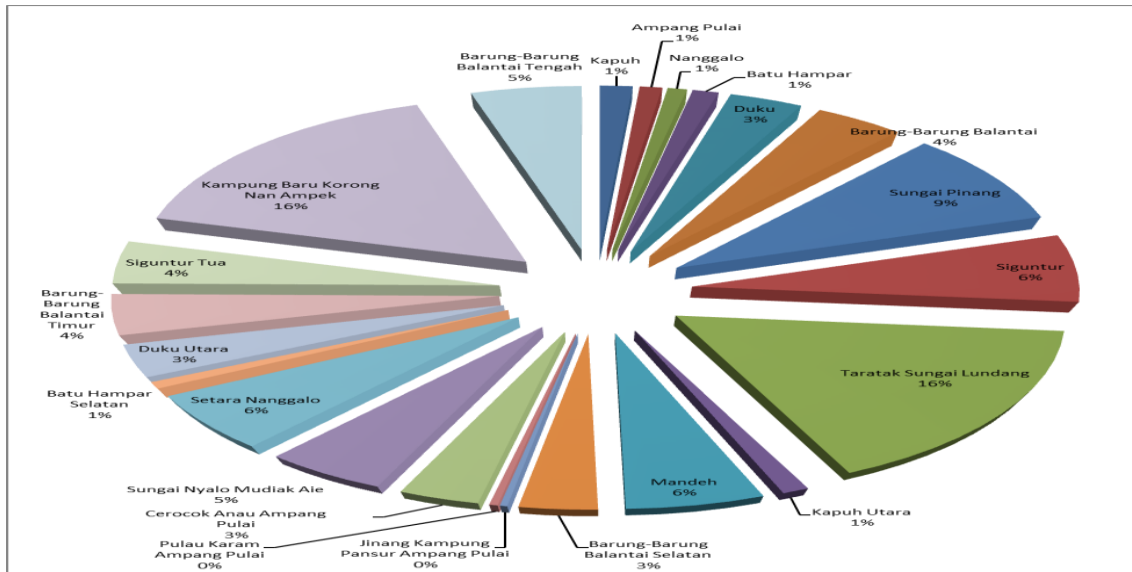
Tabel 1.1

Luas Kecamatan Koto XI Tarusan Menurut Nagari Tahun 2025

Nagari	Jumlah Kampung	Luas Daerah (Km ²)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
Kapuh	2	6,15	1,27
Ampang Pulaui	2	4,24	0,88
Nanggalo	4	3,69	0,76
Batu Hampar	2	4,96	1,02
Duku	2	13,99	2,89
Barung-Barung Balantai	2	17,23	3,56
Sungai Pinang	2	38,08	7,86
Siguntur	2	25,42	5,81
Taratak Sungai Lundang	2	72,49	14,96
Kapuh Utara	2	4,73	0,98
Mandeh	3	24,89	5,13
Barung-Barung Balantai Selatan	2	14,10	2,91
Jinang Kampung Pansur Ampang Pulaui	2	1,32	0,28
Pulau Karam Ampang Pulaui	2	1,53	0,32
Cerocok Anau Ampang Pulaui	2	1 4,45	2,98
Sungai Nyalo Mudiak Aie	2	21 ,74	4,49
Setara Nanggalo	4	25,44	5,25
Batu Hampar Selatan	2	2,65	0,61
Duku Utara	2	14,01	2,89
Barung-Barung Balantai Timur	2	17,18	3,55
Siguntur Tua	2	17,79	3,67
Kampung Baru Korong Nan Ampek	2	70,67	14,58
Barung-Barung Balantai Tengah	2	20,92	4,32
Koto XI Tarusan	51	437,73	100,00

Sumber : Kecamatan Koto XI Tarusan Dalam Angka 2025





Gambar 1.1 Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Nagari Se-Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2025

B. Kondisi Demografis

Pengetahuan tentang penduduk merupakan dasar dalam melakukan kegiatan pembangunan baik perencanaan maupun evaluasi, perkembangan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2025, dimana jumlah penduduk dihitung dari jumlah penduduk dihitung dari 6 bulan. Pada tahun 2025 nagari terbanyak jumlah penduduknya adalah nagari Kapuh dengan jumlah sebanyak 5124 jiwa dan yang paling sedikit adalah penduduk yang berada di nagari Sungai Nyalo Mudik Aie sebanyak 905 jiwa. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2

Penduduk Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2025

Nagari	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2025
(1)	(2)	(3)
Kapuh	5124	1,25
Ampang Pulau	3931	0,82
Nanggalo	3512	1,08
Batu Hampar	1509	2,42
Duku	4534	1,32
Barung-Barung Balantai	2593	0,73
Sungai Pinang	1558	1,58
Siguntur	3171	0,68
Taratak Sungai Lundang	1208	-6,60



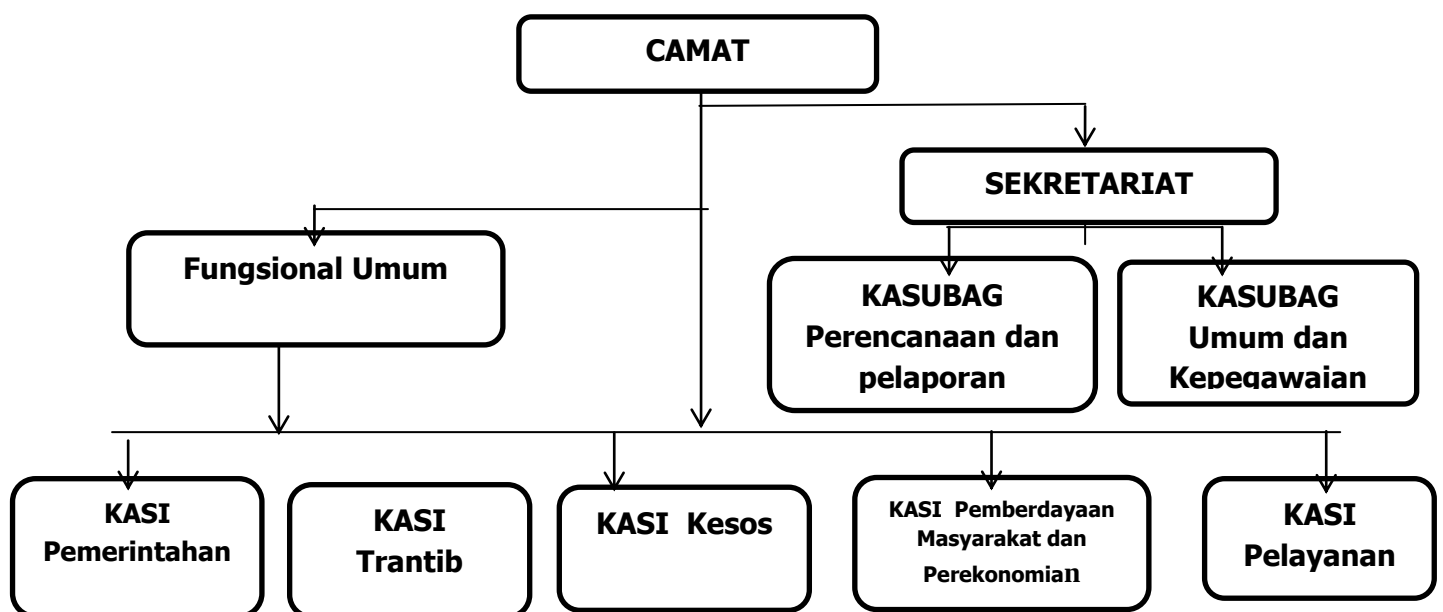
Kapuh Utara	2306	2,05
Mandeh	1565	1,94
Barung-Barung Balantai Selatan	1537	-0,72
Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau	2434	0,23
Pulau Karam Ampang Pulau	2475	1,68
Cerocok Anau Ampang Pulau	1304	1,86
Sungai Nyalo Mudiak Aie	905	1,67
Setara Nanggalo	2743	1,91
Batu Hampar Selatan	2125	1,51
Duku Utara	2389	-0,22
Barung-Barung Balantai Timur	1387	0,44
Siguntur Tua	943	1,21
Kampung Baru Korong Nan Ampek	2125	10,07
Barung-Barung Balantai Tengah	1492	-1,07
Koto XI Tarusan	52870	0,99

Sumber : Kecamatan Koto XI Tarusan Dalam Angka 2025

1.7 Struktur Organisasi

Kecamatan dipimpin oleh Camat dibantu Sekretaris, Sub, Bag dan Seksi yaitu : Sekretaris, Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian dan Seksi Pelayanan. Hal ini dapat digambarkan dengan bagan struktur berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Koto XI Tarusan



1.8 Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah personil aparat sipild Kantor Camat Koto XI Tarusan berjumlah 29 orang yang terdiri dari :

1) PNS : 16 Orang

2) Pegawai honorer : 10 Orang

Dari jumlah pegawai tersebut di atas di klasifikasikan berdasarkan golongan dan pendidikan, sebagai dapat dilihat pada tabel 1.5 dan 1.6 berikut ini

Tabel 1.5

Jumlah Pegawai di Lingkup Kantor Camat Koto XI Tarusan Berdasarkan Golongan

No	JABATAN	JML					
		Non PNS	I	II	III	IV	Jumlah
1.	Camat	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	-	1	1
3.	Sub.Bag.Umum dan Kepegaiwan	-	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	-	1	-	1
6.	Seksi Ketentrman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-
7.	Seksi Kesejahteraan Umum	-	-	-	1	-	1
8.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	-	1	-	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-	-	1	-	1
10.	Fungsional Umum	-	-	4	6	-	10
11.	Honorer	10	-	-	-	-	10
JUMLAH		10	-	4	12	2	28

Sumber : Kecamatan Koto XI Tarusan Dalam Angka 2025

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, Sdm Pemerintahan Kecamatan Koto XI Tarusan dengan jenjang pendidikan SII sebanyak 3 orang, sedangkan jenjang pendidikan DIV/SI sebanyak 16 orang mendominasi jenjang pendidikan SDM, disusul Jenjang Pendidikan DIII sebanyak 4 orang, dan SMA sebanyak 8 orang. Dari data di atas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Kecamatan Koto XI Tarusan cukup baik, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut :



Tabel 1.5.1
Jumlah Pegawai diLingkungan Kantor Camat Koto XI Tarusan Berdasarkan Pendidikan

No	UNIT KERJA	TK. PENDIDIKAN						JUMLAH
		Dasar	SMP	SMA	D3	S I	S II	
1.	Camat	-	-	-	-		1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	-	-	1	1
3.	Sub.Bag.Umum dan Kepegaiwan	-	-	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	-	-	1		1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	-
7.	Seksi Kesejahteraan Umum dan sosial	-	-	-	-	1	-	1
8.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	-	-	1	-	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-			1	-	1
10.	Fungsional Umum	-	-	4	1	4	1	10
11.	Honorer	-	-	3	3	4		10
	JUMLAH	-		8	4	15	3	28

Sumber : Kecamatan Koto XI Tarusan Dalam Angka 2025



1.9 Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Dapat digambarkan uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi kecamatan sebagai berikut :

CAMAT

TUGAS POKOK

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Nagari;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat 11 Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

FUNGSI

Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;



3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 5. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- b. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan kecamatan;
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 4. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- c. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
1. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;



3. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
- d. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi
 1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang undangan;
 2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan 13 perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- e. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi :
 1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 2. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- f. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi :
 1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 4. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.



g. Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Nagari;
2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wali Nagari;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Nagari;
5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari di tingkat kecamatan; dan
6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Nagari di tingkat kecamatan kepada Bupati.

h. Tugas Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi :

1. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
2. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.



SEKRETARIAT

TUGAS POKOK

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

FUNGSI

Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;

- a. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir bawahan dalam pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- f. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretaris serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kecamatan sebagai 16 pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
- h. Mengkoordinir urusan perlengkapan rumah tangga dan barang inventaris kecamatan;
- i. Membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi;



- j. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- k. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan; dan
- l. Mengkoordinir penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

TUGAS POKOK

- a. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

TUGAS POKOK

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
- f. Melaksanakan pengelolaan anggaran;
- g. Melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- h. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- i. Melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Seksi Pemerintahan

TUGAS POKOK

- a. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, kerjasama antar Nagari dan pihak ketiga serta tugas pembantuan;
- b. Memberikan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Nagari;
- c. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- d. Memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum Nagari;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas Nagari dan harmonisasi hubungan Nagari dengan Kecamatan;
- g. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan wali nagari;
- i. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, supervisi dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangkapengisian Perangkat Nagari (pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat Nagari);
- j. Memfasilitasi dan membina penyelenggaraan pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
- k. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
- l. Melakukan pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintahan nagari;
- m. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

TUGAS POKOK

- a. Menyusun program kerja pembinaan dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pengamanan terhadap Kantor Kecamatan serta fasilitasnya;
- c. Membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan HAM;
- d. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perizinan;
- e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- g. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- h. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
- k. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;



- n. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Sosial Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan;
- o. Menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum;
- p. Melaksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- q. Menggerakkan dan membina sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dimasing-masing Nagari dalam wilayah kecamatan;
- r. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan, penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana;
- s. Melaksanakan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
- t. Menyusun evaluasi dan laporan tentang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Sosial

TUGAS POKOK

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang sosial, kesejahteraan, dan peranan wanita,;
- b. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. Menyusun program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Melakukan pendataan keluarga miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pekerja sosial kesejahteraan masyarakat;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan penanganan sasaran penanggulangan masalah sosial;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
- i. Mengkoordinasikan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana;



- j. Melaksanakan pelayanan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- k. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Nagari dalam wilayah Kecamatan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian

TUGAS POKOK

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan;
- b. Melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan pembangunan Nagari;
- c. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dan musyawarah Nagari;
- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangan dan pembinaan perekonomian dan sumber daya manusia dan sumber daya alam;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- f. Memfasilitasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa;
- g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan Pemerintahan Nagari;
- h. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan Lingkup Kecamatan dalam forum 23 musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan serta pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan Instansi Pemerintah atau swasta di wilayah Kecamatan;
- j. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- k. Melakukan pembinaan Nagari dalam rangka persiapan lomba Nagari;
- l. Melaksanakan pendataan dan penyusunan potensi atau profil kecamatan;



- m. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat atau budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah Kecamatan dengan Instansi Pemerintah;
- n. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan;
- o. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro Nagari di wilayah Kecamatan;
- p. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah Kecamatan;
- q. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- r. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah Kecamatan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan

TUGAS POKOK

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan;
- c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan;
- d. Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan;
- f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan;
- g. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



1.10 Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2025 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2025. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisis terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang Pemerintahan Daerah Kecamatan Koto XI Tarusan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Kecamatan Koto XI Tarusan dan sistematika penyajian.

Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian tahun 2025

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan :

a. Capaian kinerja Pemerintah Daerah

Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada perjanjian kinerja pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan tahun 2025, evaluasi dan analisis capaian kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah

Bab.IV : Penutup, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja pada Kantor Camat Koto XI Tarusan Tahun 2025 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kecamatan Koto XI Tarusan

Rencana Strategis Kecamatan Koto XI Tarusan tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 43 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Koto XI Tarusan. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai pemerintahan Kecamatan Koto XI Tarusan tahun 2021-2026. Visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah:

**Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat
Di Dukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional**

2.1.2. Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan transparan
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah
4. Mewujudkan kabupaten pesisir selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan



5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Misi, Tujuan dan Sasaran

MISI		TUJUAN	SASARAN
1	Memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokrasi, dan transparansi	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi	- Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja - Meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan publik
2	Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentarm dan DInamis	Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tentram dan dinamis	Meningkatkan partisipasi warga dalam men jaga lingkungan secara mandiri

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025



2.2. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Pesisir Selatan dapat terlihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan Koto XI Tarusan	(A) 89,5
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	91,50
3	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi kecamatan	100
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	Persentase pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan kinerja baik	87%
		Angka Kemiskinan Ekstrim	0%
		Prevalensi Stunting (EPPGM)	6,5%
5	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase konflik yang diselesaikan	100%

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025



2.3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Koto XI Tarusan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan Koto XI Tarusan	Nilai	(A) 89,5
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	%	91,50
3	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi kecamatan	Nilai	100
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	Persentase pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan kinerja baik	%	87%
		Angka Kemiskinan Ekstrem	%	0%
		Prevalensi Stunting (EPPGM)	%	6,5%
5	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase konflik yang diselesaikan	%	100%

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, yang telah dilakukan baik keberhasilan- keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2025.

3.1. Metodologi Penilaian Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2025. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Koto XI Tarusan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kerja yang ditetapkan.



Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 berikut ini :

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Kategori
1.	>90-100	Sangat Memuaskan	AA
2.	>80-90	Memuaskan	A
3.	>70-80	Sangat Baik	BB
4.	>60-70	Baik	B
5.	>50-60	Cukup	CC
6.	>30-50	Kurang	C
7.	0-30	Sangat Kurang	D

Sumber : LHE 2025

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan dapat dilihat pada tabel 3.2 :

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Pemerintahan Kecamatan Koto XI Tarusan
Tahun 2025

NO	Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokrasi dan Transparan						
Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkinerja Tinggi						
1.1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan Koto XI Tarusan	Skala	(A) 89,5	68,06	76,045
1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	%	91,50	91,00	99,45
1.3	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi kecamatan	Nilai	100	53,00	53
1.4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	Persentase pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan kinerja baik	%	87%	91,30	104,94
		Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0%	0,00	0
		Prevalensi Stunting (EPPGM)	%	6,5%	10,56	162,46
Misi 3 : Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, tentram dan Dinamis						
Tujuan 3 : - Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tentram dan dinamis						



3.1	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan	%	100%	100	100
Rata-rata capaian indikator 2 Sasaran Strategis : 7 Indikator Kinerja						85,13

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 7 (Tujuh) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 2 (Dua) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2025, sebanyak 2 sasaran dan 7 indikator memiliki nilai rata-rata capaian nya sebesar 85,13 % dengan predikat sangat memuaskan.

3.3 Capaian Kinerja Pemerintahan Kecamatan Koto XI Tarusan

Adapun tingkat capaian kinerja pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan pada tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Sasaran 1 : Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

- **Indikator Nilai AKIP Kecamatan Koto XI Tarusan**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan Berkinerja terdiri atas dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Kecamatan Koto XI Tarusan

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Nilai AKIP Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Nilai AKIP Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan Koto XI Tarusan	Skala	(A) 89,5	68,06	76,045

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.3.1 di atas dapat dilihat Nilai AKIP Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2025 menggunakan Nilai AKIP Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2024. Nilai AKIP Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2025 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.



2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Realisasi Capaian dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan atau peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah di anggarkan di awal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran.

Analisis akuntabilitas kinerja juga memuat keterkaitan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan ini untuk mengevaluasi tingkat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Tahun 2025 merupakan tahun ke empat pada perencanaan renstra 2021-2026. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan tahun ini terlihat dalam table berikut :

Tabel 3.3.2.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai AKIP Kecamatan Koto XI Tarusan	Skala	74,24 (BB)	80,21 (A)	108,08 %	75 (BB)	80,24 (A)	108,08%	85	91,02	107,08

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari tabel 3.3.2 di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 91,02 %. pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan **Memuaskan**.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kecamatan Koto XI Tarusan pada tahun 2022 realisasinya 80,21, tahun 2023 realisasinya 80,24 dan tahun 2024 adalah 91,02 dengan kategori **A**.



3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai AKIP Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.3.3

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Restra	Realisasi restra	Capaian Restra
			2025	2025	2025	2025	2025	2025
1	Nilai AKIP Kecamatan Koto XI Tarusan	Skala	(A) 89,5	68,06	76,045	(75) BB	68,06	91,4

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2025 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target Jangka menengah sesuai Renstra dikategorikan tinggi. Walaupun masih ada program kegiatan yang masih perlu perbaikan dengan kata lain bisa lebih tinggi apabila sampai pada akhir periode Tahun 2025 semua berjalan lancar.

4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai AKIP Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.4 dibawah ini :

Tabel 3.3.4

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya

Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target/ Standar Nasional	Realisasi/ Standar Nasional	Capaian/ Standar Nasional
		2025	2025	2025	2025	2025	2025
Nilai AKIP Kecamatan Koto XI Tarusan	Skala	(A) 89,5	68,06	76,045	-	-	-

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025



5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Sasaran kualitas penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur dengan indikator yang diperjanjikan yaitu nilai hasil Evaluasi AKIP kecamatan Koto XI Tarusan, Komponen Perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan kinerja. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan misi camat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dipertanggungjawabkan secara periodik. Rician laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 dan 2023 penilaian capaian kinerja tersebut seperti pada tabel 3.3.5 dibawah ini :

Tabel 3.3.5

Rincian laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 dan 2024

No	Komposisi Yang Dinilai	Nilai		Komposisi yang dinilai	Nilai	
		Bobot	2023		Bobot	2024
A	Perencanaan Kinerja	30,00	25,50	Perencanaan Kinerja	30,00	21,99
B	Pengukuran Kinerja	30,00	25,94	Pengukuran Kinerja	30,00	15,84
C	Pelaporan Kinerja	15,00	11,01	Pelaporan Kinerja	15,00	10,73
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,79	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,50
E						
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,24		100	68,06

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

Tingkat akuntabilitas kinerja yang diraih oleh pemerinth Kecamatan Koto XI Tarusan berdasarkan surat dari Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700.1.2.1/720/Insp-PS/2025 tanggal 22 Maret 2025 perihal Hasil Evaluasi atas Laporan Hasil Kinerja tahun 2025, diuraikan hasil evaluasi AKIP Kecamatan koto XI Tarusan sebagai Berikut :



a. Perencanaan Kinerja Dengan Nilai 25,50

Dengan uraian sebagai berikut :

Hasil Evaluasi terhadap perencanaan kinerja sebesar 25,50 dengan uraian sebagai berikut :

- a) Terdapat sasaran pada renstra yang tidak berorientasi hasil yaitu sasaran “meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat dan meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan public”.
- b) Terdapat sasaran pada renstra “Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing” dengan indikator sasaran “meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat” tidak terdapat pada IKU
- c) Perencanaan kinerja tidak memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi kebijakan bahkan aktifitas antar seksi dengan tugas dan fungsi yang berkaitan (crosscutting)

b. Pengukuran Kinerja dengan nilai 15,84.

Dengan Uraian sebagai berikut :

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja sebesar 25,94 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Kecamatan koto XI Tarusan belum menetapkan pedoman teknis berupa SOP pengukuran kinerja. Hal ini berdampak pada kualitas pengukuran kinerja yang kurang memadai.
- b. Belum terdapatnya mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja sehingga data kinerja yang dikumpulkan belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- c. Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja/penghasilan namun belum sepenuhnya dijadikan untuk penempatan/penghapusan jabatan struktural maupun fungsional, penyesuaian refocusing, penyesuaian strategi, penyesuaian kebijakan, penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran dan efisiensi dalam mencapai kinerja.
- d. Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja dengan nilai 10,73

Hasil Evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar 11,01 dengan uraian sebagai berikut

- a. Dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan relisasi kinerja dilevel Nasional/Internasional (Benchmark kinerja)
- b. Laporan belum sepenuhnya digunakan untuk penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran, evaluasi pencapaian keberhasilan kerja dan perubahan budaya organisasi.



c. Dalam dokumen laporan kinerja telah menyajikan analisis penggunaan sumber daya pada masing-masing indikator kinerja namun perhitungan efisiensi terhadap capaian kinerja belum memadai.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 19,50

Hasil Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar 17,79 dengan uraian sebagai berikut :

1. Rekomendasi atas nilai evaluasi akuntabilitas kinerja kecamatan Koto XI Tarusan belum sepenuhnya dijadikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan pemanfaatan perbaikan kinerja, efektivitas dan efisiensi kinerja.
2. Nilai SAKIP tahun 2024 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, nilai SAKIP tahun sebelumnya 80,24

Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Koto XI Tarusan, direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Melakukan monitoring kinerja atas Rencana Aksi setiap bulan, triwulan, dan semesteran dengan membuat laporan monitoring dengan kriteria:

- Dalam merumuskan sasaran pada renstra yang tidak berorientasi hasil yaitu sasaran “meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat
- Tujuan pada renstra “Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing” dengan dengan sasaran “meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat” agar diselaraskan dan dimuat pada IKU
- Perencanaan kinerja harus memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi kebijakan bahkan aktifitas antar seksi dengan tugas dan fungsi yang berkaitan (crosscutting)

2. Pengukuran Kinerja

- a. Kecamatan koto XI Tarusan agar menetapkan pedoman teknis berupa SOP pengukuran kinerja. Sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pengukuran kinerja .
- b. Agar melengkapi data dukung capaian kinerja sehingga data kinerja yang dikumpulkan mendukung capaian kinerja yang diharapkan
- c. Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja/penghasilan harus dijadikan untuk penempatan/penghapusan jabatan struktural maupun fungsional, penyesuaian refocusing, penyesuaian strategi, penyesuaian



kebijakan,penyesuaian aktivitas,penyesuaian anggaran dan efisiensi dalam mencapai kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

- Dokumen laporan kinerja harus memberikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan relisasi kinerja dilevel Nasional/Internasional (Benchmark kinerja)
- Agar Laporan kinerja digunakan sebagai penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran, evaluasi pencapaian keberhasilan kerja dan perubahan budaya organisasi.
- Dokumen laporan kinerja agar menyajikan analisis penggunaan sumber daya dan perhitungan efisiensi terhadap capaian kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja kecamatan Koto XI Tarusan dijadikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan pemanfaatan perbaikan kinerja, efektifitas dan efisiensi kinerja

6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.3.4
Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Nilai AKIP

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Nilai AKIP Kecamatan Koto XI Tarusan	Skala	(A) 89,5	68,06	76,045	2.586.303.788	2.63.709.918	83,66	16,34

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \frac{\{\text{Jumlah Realisasi}\}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 16,34%.



7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- b. Pengadaan Mebel

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.



Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.163.709.918 atau 83,66% dari total anggaran sebesar Rp. 2.586.303.788, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 16,34%.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

• Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik terdiri atas dari indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat telah dilakukan survey di kantor Camat Koto XI Tarusan dengan responden sebanyak 181 orang responden pada periode Januari-Juni tahun 2025.

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3.8
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	91,5	91,66	100,17

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 91,66 dari target sebesar 91,5 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,17 % atau mencapai target.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\{\text{Realisasi}\}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 100,17%.



2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Realisasi Capaian dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan atau peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah di anggarakan di awal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran.

Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat juga memuat keterkaitan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan ini untuk mengevaluasi tingkat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Tahun 2025 merupakan tahun ke empat pada perencanaan renstra 2021-2026. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan tahun ini terlihat dalam table berikut :

Tabel 3.3.8
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	85	80,02	93,05%	86	89	103,49%	85	91.02	107,08%

Sumber : Perencanaan dan Laporan tahun 2025

Dari tabel 3.3.8 di atas dapat dilihat pada capaian indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2025 sebesar 100,17 % terjadi Penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 Capaian Indikator kinerja sebesar 103,49% dan tahun 2024 Capaian Indikator Kinerja sebesar 107,08%. Pencapaian sasaran strategis tahun 2025 termasuk kategori keberhasilan **Memuaskan**.

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.9 dibawah ini :



Tabel 3.3.9

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Restra	Realisasi restr	Capaian Restra
			2025	2025	2025	2025	2025	2025
1	Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	91,5	91,66	100,17	88	91,66	104,15%

Sumber : Perencanaan dan Laporan Tahun 2025

Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2025 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa Target pada Perjanjian Kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan target Jangka menengah sesuai Renstra. Walaupun terjadi perubahan target capaian namun dapat dicapai dengan maksimal dan berjalan dengan lancar. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 dilakukan survey oleh kecamatan Koto XI Tarusan.

4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.3.10 dibawah ini :

Tabel 3.3.10

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya

Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target/ Standar Nasional	Realisasi/ Standar Nasional	Capaian/ Standar Nasional
		2025	2025	2025	2025	2025	2025
Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	91,5	91,66	100,17	-	-	-

Sumber : Perencanaan dan Laporan Tahun 2025



5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsure pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM pada Kecamatan Koto XI Tarusan yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur**: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian**: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/tarif**: Biaya/ tariff adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan**: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan



penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. **Sarana dan prasarana** :Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.3.10

Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	91,5	91,66	100,17	2.586.303.788	2.63.709.918	83,66	16,34

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Anggaran}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 16,34%.



7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- b. Pengadaan Mebel

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.



Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.163.709.918 atau 83,66% dari total anggaran sebesar Rp. 2.586.303.788, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 16,34%.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah.

- **Indikator Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan**

Mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri dalam Negeri nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang penguatan system Inovasi daerah, dimana daerah dalam rangka peningkatan pemerintah daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia diperlukan penguatan system inovasi daerah secara terarah dan berkesinambungan. Berhubungan dengan dasar hukum diatas maka Kecamatan Koto XI Tarusan menetapkan Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik terdiri atas dari indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan. Inovasi PENA SIASAT pada tahun 2024 hanya terdapat 15 nagari dan beberapa stekholder terkait yang ikut serta petugas social yang ada dilingkungan masyarakat.

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3.12
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kuaitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	%	100	53	53

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel diatas diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Koto XI Tarusan mencapai 53 dari target 100,00 atau tingkat capaiannya mencapai 53,00%. Inovasi yang divalidasi dan disetujui (approve) serta dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri yaitu PENA SIASAT dengan predikat **rendah** yang sudah tahap implementasi sejak Tahun 2024.



Capaian kinerja nyata Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan terhadap pelayanan kecamatan sebesar 53 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 53% atau tidak mencapai target. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\{\text{Realisasi}\}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 53%.

2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Realisasi Capaian dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan atau peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah di anggarakan di awal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran.

Analisis Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan juga memuat keterkaitan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan ini untuk mengevaluasi tingkat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Tahun 2025 merupakan tahun ke empat pada perencanaan renstra 2021-2026. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan tahun ini terlihat dalam table berikut :

Tabel 3.3.13
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	%	1	1	100%	1	1	100%	75	98	130,6

Sumber : Perencanaan dan Laporan Tahun 2025

Dari tabel 3.3.13 di atas dapat dilihat pada capaian indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2025 sebesar 53 % terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 Capaian Indikator kinerja sebesar 100% dan tahun 2024 Capaian Indikator Kinerja sebesar 130,6%. Pencapaian sasaran strategis tahun 2025 termasuk kategori keberhasilan **tidak memuaskan**.



3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.14 dibawah ini :

Tabel 3.3.14
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kematangan Inovasi Kecamatan Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Restra	Realisasi restra	Capaian Restra
			2025	2025	2025	2025	2025	2025
1	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	%	100	53	53	Tidak Ada Rasionalisasi Renstra. Tidak Tahap Perubahan Renstra tingkat Kecamatan		

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2025 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa target Jangka menengah sesuai Renstra tidak memiliki target Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan sedangkan pada Perjanjian Kinerja target capaian sebesar 53% dengan capaian Sangat Tinggi .

4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak terdapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.



5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- Adanya Sinergitas OPD dalam Lingkup Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan sehingga dapat merumuskan inovasi terbaru di Kecamatan
- Adanya forum-forum yang telah terbentuk sehingga memudahkan perumusan inovasi-inovasi kecamatan
- Adanya dukungan dari Stekholder Kecamatan dan juga Pimpinan Daerah (Bupati) untuk terus berinovasi di Kecamatan Koto XI Tarusan

Potensi Hambatan :

- Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mampu mendukung dalam penerapan Inovasi yang telah dibuat.
- Belum adanya buku inovasi yang merupakan sumber informasi inovasi yang ada di Kecamatan Koto XI Tarusan

Sasaran Pemecahan :

- Melakukan Pelatihan dan Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat guna peningkatan sumber daya yang ada.
- Perlunya Penyusunan data dan informasi terkait Inovasi sebagai sumber informasi inovasi yang ada di Kecamatan Koto XI Tarusan



6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.3.15
Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Kematangan Inovasi
Kecamatan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	%	100	53	53	19.795.000	19.484.475	98	2

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Anggaran}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 2%.

7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan

Kegiatan terdiri dari :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :



- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa;
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 19.484.475 atau 98% dari total anggaran sebesar Rp 19.795.000, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 2%.

Sasaran 4 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembinaan Pemerintahan Nagari.

A. Indikator Persentase Pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan Kinerja baik

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik terdiri atas dari indikator kinerja yaitu Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik.

Penghitungan Realisasi Indikator Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Nagari yang Administrasi baik}}{\text{Jumlah Nagari}} \times 100$$

Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik terdapat 21 Nagari dari 23 Nagari, sehingga persentase realisasi kinerja sebesar 91.30%.

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3.16
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik	%	87	91.3	104,94

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025



Dari Tabel diatas diatas dapat dilihat realisasi capaian Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Kecamatan Koto XI Tarusan mencapai 91.3 dari target 87 atau tingkat capaiannya mencapai 104.94%.

Capaian kinerja nyata Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik terhadap pelayanan kecamatan sebesar 91.3 dari target sebesar 87 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 104,94 % atau mencapai target.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\{\text{Realisasi}\}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 104,94 %.

2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Realisasi Capaian dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan atau peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah di anggarakan di awal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran.

Analisis Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik juga memuat keterkaitan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan ini untuk mengevaluasi tingkat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Tahun 2025 merupakan tahun ke empat pada perencanaan renstra 2021-2026. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan tahun ini terlihat dalam table berikut :

Tabel 3.3.13
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik	%							75	86,9	115,8

Sumber : Perencanaan dan Laporan Tahun 2025

Dari tabel 3.3.13 di atas dapat dilihat pada capaian indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2025 sebesar 104,94 % terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2024



Capaian Indikator kinerja sebesar 115,8%. Pencapaian sasaran strategis tahun 2025 termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*.

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.317 dibawah ini :

Tabel 3.3.17
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Restra	Realisasi restr	Capaian Restra
			2025	2025	2025	2025	2025	2025
1	Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik	%	87	91.3	104,94	Tidak Ada Rasionalisasi Renstra. Tidak Tahap Perubahan Renstra tingkat Kecamatan		

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2025 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa target Jangka menengah sesuai Renstra tidak memiliki target Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik sedangkan pada Perjanjian Kinerja target capaian sebesar 104,94 % dengan capaian Sangat Tinggi .

4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak terdapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.



5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Faktor keberhasilan :

- ☐ Koordinasi yang baik antar Instansi/Badan dan organisasi terkait dalam daerah.
- ☐ terlaksananya perencanaan kerja yang terprogram
- ☐ Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai
- ☐ tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM yang terkait
- ☐ adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan
- ☐ Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat

Faktor Kegagalan :

Selama program berlangsung tidak ditemui kendala yang dapat menjadi faktor kendala serta permasalahan yang berarti dalam upaya pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.3.18
Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik	%	87	91.3	104,94	19.795.000	19.484.475	98	2

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \frac{\{\text{Jumlah Realisasi}\}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100\%$$



Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 2%.

7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan

Kegiatan terdiri dari :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa;
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Kecamatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 19.484.475 atau 98% dari total anggaran sebesar Rp 19.795.000, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 2%.

B. Angka Kemiskinan Ekstrim

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik terdiri atas dari indikator kinerja yaitu Angka Kemiskinan Ekstrim.

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3.19
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0	0	100

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025



Dari Tabel diatas diatas dapat dilihat realisasi capaian Angka Kemiskinan Ekstrim Kecamatan Koto XI Tarusan mencapai 0 dari target 0 atau tingkat capaiannya mencapai 100,00%.

2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Realisasi Capaian dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan atau peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah di anggarkan di awal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran.

Analisis Angka Kemiskinan Ekstrim Kecamatan juga memuat keterkaitan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan ini untuk mengevaluasi tingkat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Tahun 2025 merupakan tahun ke empat pada perencanaan renstra 2021-2026. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan tahun ini terlihat dalam table berikut :

Tabel 3.3.13
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Angka Kemiskinan Ekstrim	%							0	0	0

Sumber : Perencanaan dan Laporan Tahun 2025

Dari tabel 3.3.13 di atas dapat dilihat pada capaian indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2025 sebesar 0 % tidak terjadi penurunan /peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2024 Capaian Indikator kinerja sebesar 00%. Pencapaian sasaran strategis tahun 2025 termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*.

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrim Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.20 dibawah ini :



Tabel 3.3.20

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Angka Kemiskinan Ekstrim Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Restra	Realisasi restr	Capaian Restra
			2025	2025	2025	2025	2025	2025
1	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0	0	100	Tidak Ada Rasionalisasi Renstra. Tidak Tahap Perubahan Renstra tingkat Kecamatan		

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2025 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa target Jangka menengah sesuai Renstra tidak memiliki target Angka Kemiskinan Ekstrim sedangkan pada Perjanjian Kinerja target capaian sebesar 100% dengan capaian Sangat Tinggi .

4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai AKIP Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.4 dibawah ini :

Tabel 3.3.4

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Kemiskinan Ekstrim Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya

Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target/ Standar Nasional	Realisasi/ Standar Nasional	Capaian/ Standar Nasional
		2025	2025	2025	2025	2025	2025
Angka Kemiskinan Ekstrim	Skala	0	0	100	7,0-8,0%	8,47%	8,25%

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025



5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Adanya kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan dalam rangka menanggulangi kemiskinan yang terkait dengan dimensi:

a. Dimensi ekonomi

Telah dilakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah sosial, meningkatkan pelayanan sosial dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, meningkatkan jumlah wirausaha, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyaluran bantuan kepada masyarakat kurang mampu, meningkatkan program PNPM, menumbuhkembangkan produk lokal yang handal, mengembangkan kawasan sentra industri, meningkatkan nilai tambah produk lokal unggulan, membina dan memberdayakan IKM, koperasi dan UKM.

b. Dimensi pendidikan

Kebijakan yang telah dilakukan adalah memfasilitasi PKBM, meningkatkan ketersediaan prasarana dan sara pendidikan dan memberdayakan masyarakat dan kelembagaan kampung. Melalui Nagari terkait

c. Dimensi kesehatan

Kebijakan yang telah dilaksanakannya itu meningkatkan upaya kesehatan masyarakat, memperbaiki gizi masyarakat dan meningkatkan upaya kesehatan lingkungan ang berkja sama dengan Puskesmas yang ada di Kecamatan Koto XI Tarusan.

d. Dimensi prasarana dasar

Kebijakan yang telah dilakukan dan bekerja sama dengan nagari serta stekholder terkait adalah meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses pendidikan, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan,serta penyediaan air baku dan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

e. Dimensi ketahanan pangan

Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah kecamatan Koto XI Tarusanyang bekerja sama dengan nagari serta stekholder terkait adalah meningkatkan jalan produksi pertanian, perkebunan.



6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.3.21
Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Angka Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Angka Kemiskinan Ekstrem	%	0	0	100	19.795.000	19.484.475	98	2

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Anggaran}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 2%.

7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan

Kegiatan terdiri dari :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa;
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan.



Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 19.484.475 atau 98% dari total anggaran sebesar Rp 19.795.000, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 2%.

C. Prevalensi Stunting (EPPGM)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik terdiri atas dari indikator kinerja yaitu Prevalensi Stunting (EPPGM).

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Prevalensi Stunting (EPPGM) Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	Prevalensi Stunting (EPPGM)	%	6,5	10,56	162,46

Dari Tabel diatas diatas dapat dilihat realisasi capaian Prevalensi Stunting (EPPGM) Kecamatan Koto XI Tarusan mencapai 10,56 dari target 6,5 atau tingkat capaiannya mencapai 162,46% atau terjadi peningkatan stunting.

Untuk Pencapaian Realisasi Prevalensi Stunting (EPPGM) dengan memakai Rumus :

$$\text{Jumlah Realisasi} = 6,5\% \times \frac{\text{Jumlah Sisa Stunting}}{\text{Jumlah Stunting}}$$

2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Realisasi Capaian dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan atau peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah di anggarakan di awal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran.

Analisis Prevalensi Stunting (EPPGM) juga memuat keterkaitan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan ini untuk mengevaluasi tingkat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Tahun 2025 merupakan tahun ke empat pada perencanaan renstra 2021-2026. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan tahun ini terlihat dalam table berikut :



Tabel 3.3.13
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator
Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Prevalensi Stunting (EPPGM)	%							7	5,7	81,4

Sumber : Perencanaan dan Laporan Tahun 2025

Dari tabel 3.3.13 di atas dapat dilihat pada capaian indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2025 sebesar 162,46 % terjadi penurunan atau peningkatan jumlah stunting dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2024 Capaian Indikator kinerja sebesar 81,4%. Pencapaian sasaran strategis tahun 2025 termasuk kategori keberhasilan tidak *memuaskan*.

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Prevalensi Stunting (EPPGM) Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Restra	Realisasi restr	Capaian Restra
			2025	2025	2025	2025	2025	2025
1	Prevalensi Stunting (EPPGM)	%	6,5	10,56	162,46	Tidak Ada Rasionalisasi Renstra. Tidak Tahap Perubahan Renstra tingkat Kecamatan		

Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2025 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa target Jangka menengah sesuai Renstra tidak memiliki target Prevalensi Stunting (EPPGM) sedangkan pada Perjanjian Kinerja target capaian sebesar 162,46% dengan capaian tidak memuaskan .



4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Prevalensi Stunting (EPPGM) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.4 dibawah ini :

Tabel 3.3.4
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Prevalensi Stunting (EPPGM) Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya

Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target/ Standar Nasional	Realisasi/ Standar Nasional	Capaian/ Standar Nasional
		2025	2025	2025	2025	2025	2025
Prevalensi Stunting (EPPGM)	Skala	6,5	10,56	162,46	18,8%	14%	77,77

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Permasalahan dan Solusi Prevalensi Stunting Anak Balita yang Berkalaborasi dengan Puskesmas

- a) Perlu melakukan skrining anemia remaja putri dan pelaksanaan pemeriksaan HB yang dilengkapi dengan pemahunan BMHP bagi pemeriksaan HB di Puskesmas.
- b) Belum optimalnya konsumsi TTD Rematri.
- c) Masih kurangnya SDM untuk mendukung penanganan stunting dipuskesmas, terutama tenaga dokter, sanitarian, apoteker dan tenaga laboratorium



6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Prevalensi Stunting (EPPGM)	%	6,5	10,56	162,46	19.795.000	19.484.475	98	2

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Anggaran}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 2%.

7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan

Kegiatan terdiri dari :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa;
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2025 sebesar Rp. 19.484.475 atau 98% dari total anggaran sebesar Rp 19.795.000, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 2%.



Sasaran 5 : Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di kecamatan

Tolok ukur capaian sasaran Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkatkan Capaian Indikator ini dihitung dari formula penghitungan yaitu persentase dari jumlah Konflik yang Tertangani dibagi Jumlah Konflik yang terjadi dikali 100%. Jumlah Konflik yang terjadi ini dilihat dari kejadian-kejadian yang terjadi di Kecamatan Koto XI Tarusan yang di analisa bisa menimbulkan Potensi Konflik di Kecamatan Koto XI Tarusan.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tentram dan Dinamis terdiri atas dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Koto XI Tarusan

1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Nilai AKIP Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tentram dan Dinamis	Persentase Konflik yang diselesaikan	%	100%	100	100%

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2025 masih menggunakan Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2023 dikarenakan Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2025 belum tersedia. Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2025 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Realisasi Capaian dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan atau peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah di anggarkan di awal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran.

Analisis Persentase Konflik yang diselesaikan juga memuat keterkaitan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan ini untuk mengevaluasi tingkat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Tahun 2025 merupakan tahun ke empat pada perencanaan renstra 2021-2026. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan tahun ini terlihat dalam table berikut :

Tabel 3.3.13
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator
Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Konflik yang diselesaikan	%							80%	100	125%

Sumber : Perencanaan dan Laporan Tahun 2025

Dari tabel 3.3.13 di atas dapat dilihat pada capaian indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2025 sebesar 100 % terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2024 Capaian Indikator kinerja sebesar 125%. Pencapaian sasaran strategis tahun 2025 termasuk kategori keberhasilan *memuaskan*.

3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target Restra	Realisasi restru	Capaian Restra
			2025	2025	2025	2025	2025	2025
1	Persentase Konflik yang diselesaikan	%	100%	100	100%	Tidak Ada Rasionalisasi Renstra. Tidak Tahap Perubahan Renstra tingkat Kecamatan		



Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2025 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa target Jangka menengah sesuai Renstra tidak memiliki target Persentase Konflik yang diselesaikan sedangkan pada Perjanjian Kinerja target capaian sebesar 100% dengan capaian Sangat Tinggi .

4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi PK	Capaian PK	Target/ Standar Nasional	Realisasi/ Standar Nasional	Capaian/ Standar Nasional
		2025	2025	2025	2025	2025	2025
Persentase Konflik yang diselesaikan	%	100%	100	100%	-	-	-

5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Ada beberapa faktor yang mendukung tercapainya Indikator Sasaran ini diantaranya :

- Dukungan dana dari Stekholder untuk pelaksanaan program dan kegiatan KEcamatan Koto XI Tarusan
- Sinergisitas antar lembaga dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik yang terjadi di KEcamatan Koto XI Tarusan
- Dukungan warga tarusan secara keseluruhan dalam menjaga kondusifitas KEcamatan Koto XI Tarusan.



6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Persentase Konflik yang diselesaikan	%	100%	100	100%	3.395.000	3.323.550	97,90	2,1

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \frac{\{\text{Jumlah Realisasi}\}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 2,1%.

7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.323.550 atau 97,9% dari total anggaran sebesar Rp. 3.395.000, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 2,1%.



3.4. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan, DPA Perubahan Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 2.586.303.788,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.2.163.709.918,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 83,66%

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.7
Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

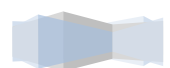
No	Program/Kegiatan	Belanja (RP)			Hasil Keluaran		
		Anggaran	Realisasi	Capaian	Rencana	Realisasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.563.113.788	2.140.901.893	83,53			
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.840.000	6.531.800	95,49	12 Bulan	12 Bulan	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.710.000	3.529.400	95,13	2 Laporan	2 Laporan	100%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.130.000	3.002.400	95,92	9 Laporan	9 Laporan	100%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.764.317.538	1.731.620.606	98,15	12 Bulan	12 Bulan	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.721.027.538	1.688.330.606	98,10	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.290.000	43.290.000	100,00	12 Bulan	12 Bulan	100%
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.962.227	149.313.783	99,57	12 Bulan	12 Bulan	100%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.385.261	6.370.000	99,76	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.960.581	13.936.625	99,83			
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.461.135	11.396.000	99,43	12 Bulan	12 Bulan	100%
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	100,00	12 Bulan	12 Bulan	100%
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.114.000	36.997.008	99,68	12 Bulan	12 Bulan	100%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.441.250	77.014.150	99,45	12 Bulan	12 Bulan	100%
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.174.390	54.341.171	87,40	12 Bulan	12 Bulan	100%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.115.812	2.891.228	40,63	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.058.578	51.449.943	93,45	12 Bulan	12 Bulan	100%
E	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	579.819.633	199.094.533	34,34	12 Bulan	12 Bulan	100%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	36.900.000	32.712.643	88,65	12 Bulan	12 Bulan	100%





	Operasional Atau Lapangan						
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.800.000	4.800.000	100,00			
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	538.119.633	161.581.890	30,03			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.795.000	19.484.475	98,43			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.795.000	19.484.475	98,43			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	4.135.000	4.052.100	98,00			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.660.000	15.432.375	98,55			
	PTOGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.395.000	3.323.550	97,90			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah	3.395.000	3.323.550	97,90			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.395.000	3.323.550	97,90			
JUMLAH		2.586.303.788	2.163.709.918	83,66			





BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran

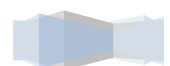
Dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan, 2 (dua) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100% atau lebih, dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 85%, dengan nilai tertinggi adalah 104,94% yaitu sasaran “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan nagari dengan indicator persentasi pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan kineja baik”. Untuk nilai terendah sebesar 162,46% (penilaian stunting yaitu semakin tinggi nilai persentasi, berate semakin banyak nilai stunting) yaitu sasaran “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan nagari dengan indicator Prevalensi Stunting (EPPGM)”.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 7 (Tujuh) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 2 (enam) indikator kinerja berhasil mencapai dan melampaui target. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target adalah 85,13%, dengan nilai tertinggi adalah 104,94% yaitu indikator kinerja “persentasi pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan kineja baik”, sedangkan indikator kinerja yang nilai terendah sebesar 162,46% (penilaian stunting yaitu semakin tinggi nilai persentasi, berate semakin banyak nilai stunting) yaitu sasaran “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan nagari dengan indicator Prevalensi Stunting (EPPGM)”.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja daerah pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 2.163.709.918,— atau 83,66% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 2.586.303.788,—. Dari 2 (dua) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis nilai tertinggi adalah 104,94% yaitu sasaran “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan nagari dengan indicator persentasi pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan kineja baik”. Untuk nilai terendah sebesar 162,46% (penilaian stunting yaitu semakin tinggi nilai persentasi, berate



semakin banyak nilai stunting) yaitu sasaran “Menigkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan nagari dengan indicator Prevalensi Stunting (EPPGM)”.

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan yang melibatkan seluruh stekholder terkait secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
2. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat ;
4. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah pusat, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kecamatan Koto XI Tarusan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran

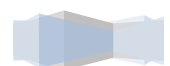
Dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan, 2 (dua) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100% atau lebih, dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 85%, dengan nilai tertinggi adalah 104,94% yaitu sasaran “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan nagari dengan indicator persentasi pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan kineja baik”. Untuk nilai terendah sebesar 162,46% (penilaian stunting yaitu semakin tinggi nilai persentasi, berate semakin banyak nilai stunting) yaitu sasaran “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan nagari dengan indicator Prevalensi Stunting (EPPGM)”.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 7 (Tujuh) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 2 (enam) indikator kinerja berhasil mencapai dan melampaui target. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target adalah 85,13%, dengan nilai tertinggi adalah 104,94% yaitu indikator kinerja “persentasi pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan kineja baik”, sedangkan indikator kinerja yang nilai terendah sebesar 162,46% (penilaian stunting yaitu semakin tinggi nilai persentasi, berate semakin banyak nilai stunting) yaitu sasaran “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan nagari dengan indicator Prevalensi Stunting (EPPGM)”.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja daerah pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 2.163.709.918,— atau 83,66% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 2.586.303.788,—. Dari 2 (dua) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis nilai tertinggi adalah 104,94% yaitu sasaran “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan nagari dengan indicator persentasi pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan kineja baik”. Untuk nilai terendah sebesar 162,46% (penilaian stunting yaitu semakin tinggi nilai persentasi, berate



semakin banyak nilai stunting) yaitu sasaran “Menigkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan nagari dengan indicator Prevalensi Stunting (EPPGM)”.

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan yang melibatkan seluruh stekholder terkait secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
2. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat ;
4. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah pusat, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kecamatan Koto XI Tarusan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.

